

**PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
PERJANJIAN KREDIT DI BANK RAKYAT INDONESIA (BRI)
KC SOLO KARTASURA**



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat

Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

ANDI SETYA NURDIN
NIM. C 100 060 161

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹ Berdasarkan prinsip kehati-hatian, bank konvensional dan bank syariah harus berhati-hati memilih calon nasabah dalam pengajuan permohonan kredit dalam prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi adanya wanprestasi oleh debitur atau nasabah. Penyebab dari kemacetan dalam kredit dalam prinsip syariah ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh nasabah saja, akan tetapi juga terdapat faktor yang berasal dari pihak bank itu sendiri. Faktor yang berasal dari bank yang menyebabkan kemacetan pemberian kredit atau pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah adalah kurangnya ketelitian oleh pihak bank dalam menerapkan prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan oleh bank saat memberikan kredit atau pembiayaan dalam prinsip syariah.

Jadi dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang diucapkan atau tertulis. Dari perjanjian tersebut timbul semua hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan. Perjanjian berarti menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau lebih. Perjanjian dinamakan juga persetujuan, karena dua orang atau lebih itu sepakat untuk

¹ Undang-Undang Republik Indonesia no.7 tahun 1992.

melakukan sesuatu. Suatu perikatan adalah suatu hubungan antara dua orang atau lebih dimana pihak yang lain berkewajiban untuk tuntutan, demikian juga sebaliknya.²

Prinsip yang harus dilaksanakan oleh bank dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ini adalah kewajiban bank untuk berhati-hati dalam memilih calon nasabah yang mengajukan kredit. di sini juga ada faktor hubungan kerjasama dengan baik dan keuntungan yang bersifat timbal balik antara masyarakat dan bank. Ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan yang menyebutkan bahwa bank dalam memberikan kreditnya wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.³ Hubungan pinjam-meminjam tersebut dapat dilakukan dengan kesepakatan antara peminjam (debitur) dan yang meminjamkan (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian tersebut bisa berupa perjanjian lisan atau dalam bentuk perjanjian tertulis yang juga dapat dibuat dengan akta di bawah tangan atau dengan akta notaris.

Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-

² Subekti, 1997. Aneka Perjanjian. Bandung: Citra Aditia Bakti. Hal. 1.

³ Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat kepadanya.⁴ Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di Bank. Berdasarkan hal tersebut, maka didalam memberikan suatu kredit, Bank mempunyai kewajiban untuk memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan Bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian Bank. Mengingat Bank terutama bekerja dengan adanya dana dari masyarakat yang disimpan pada Bank atas dasar kepercayaan oleh karenanya maka setiap Bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat.

Selama ini pemerintah telah mencurahkan perhatian pada penyempurnaan peraturan-peraturan hukum di bidang perbankan. Bahkan, peraturan yang berhubungan dengan prudential regulation (peraturan menyangkut kehati-hatian) dirasakan sudah cukup memadai. Namun demikian kelengkapan peraturan tersebut tidaklah cukup untuk dijadikan ukuran bahwa perbankan nasional telah lepas dari segala permasalahan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan keroposnya sistem perbankan nasional adalah akibat perilaku para pengelola dan pemilik Bank yang mengeksploitasi dan mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya. Selain ditunjang faktor lainnya yaitu lemahnya pengawasan.

⁴. Djaja Agus, *Penerapan prinsip kehati-hatian/prudential banking terhadap pemberian kredit di PT Mandiri (persero) Tbk dalam rangka good corporate governance*, [http:// www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=88897](http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=88897), download tanggal 10 Maret 2010.

Kasus yang merupakan hasil dari pergesekan kepentingan antara pihak bank dan nasabah dapat dilihat dalam kasus-kasus yang telah terjadi di dalam dunia perjanjian kredit. Sebagai contoh kasus yang dialami oleh Bank Mandiri saat ini, sepertinya harus dijadikan pelajaran bagi Bank atau lembaga lain yang juga menyalurkan kredit, Betapa tidak diduga lalainya dalam menerapkan prinsip kehati-hatian saat mengucurkan kredit, Bank Mandiri saat ini, sepertinya harus dijadikan pelajaran bagi Bank atau lembaga lain yang juga menyalurkan kredit.⁵ Dalam kasus ini di atas pihak Bank Mandiri digugat secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kasus tersebut karena kurang kehati-hatian pihak Bank dalam melaksanakan perjanjian kredit. Bank Mandiri memberikan kredit dengan jaminan HGB 6135 kepada PT. Mersani Budi Kusuma akan tetapi pihak bank tidak melakukan pengecekan lapangan terlebih dahulu yang ternyata HGB 6135 dimiliki oleh pihak lain. Sehingga ketika kredit macet Bank Mandiri menyegel bangunan yang bukan milik PT. Mersani Budi Kusuma. Hal ini merupakan bukti bahwa prinsip kehati-hatian harus diperhatikan oleh pihak bank, karena jika terjadi kesalahan dalam pemberian kredit dapat merugikan para pihak tidak hanya pihak bank saja akan tetapi juga para pihak debitur bahkan pihak lain seperti dalam kasus ini.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Baringin Sianturi setuju mencabut keterangan saksi ahli dari Bank Indonesia (BI) Nani Purwati dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), karena yang bersangkutan memberikan kesaksian

⁵ IHW, Langgar Prinsip Kehati-hatian Mandiri digugat, Kamis 29 Maret 2007,

di luar keahliannya. Dalam kesaksiannya di hadapan sidang, Nani Purwati juga mengatakan, jika seluruh peraturan mengenai pemberian kredit dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian (prudential banking) serta seluruh proses telah dilaksanakan, maka tidak ada yang salah dalam pemberian kredit. Penjadualan kembali utang atau rescheduling bukan berarti ada kesalahan dan pelanggaran dalam pemberian kredit, penjadualan kembali utang atau rescheduling juga bukan berarti sudah ada kerugian bagi bank. Banyak faktor yang bisa membuat kredit itu macet, paparnya.⁶

Faktor keyakinan bank sebagai unsur kehati-hatian Bank dalam memberikan kredit, dapat diperoleh dari penilaian bank terhadap debitur. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menerapkan kriteria-kriteria yang telah menjadi standar dalam dunia perbankan. Penerapan prinsip kehati-hatian dan asas-asas yang berlaku di dunia perbankan sebenarnya ditujukan untuk menghindari sistem keuangan tidak bekerja dengan baik, karena apabila sistem keuangan tidak dapat lagi berjalan secara optimal, maka berakibat pada perekonomian menjadi tidak efisien serta berakibat pada pertumbuhan ekonomi tidak sesuai harapan. Yang menjadi persoalan kehati-hatian adalah menyangkut banyak aspek diantaranya apakah Bank tersebut sudah meyakini pemberian kredit, tidak akan merugikan bank dengan memperhatikan seluruh Undang Undang maupun peraturan yang telah ditetapkan

<http://www.hukumonline.com/berita/hol16437/langgar-prinsip-bank-mandiri-mandiri-digugat,donwload> tanggal 10 Maret 2010

⁶ JPU Kasus Bank Mandiri Cabut Keterangan Saksi Ahli,

http://www.kapanlagi.com/h/0000094624_print.html, download tanggal 20 Maret 2010.

Bank yang pada hakikatnya merupakan lembaga intermediasi di mana di satu sisi ia menampung dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan di sisi lain ia juga menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sebagai pemberi kredit, bank wajib menetapkan suatu kebijakan perkreditan agar tetap dapat memelihara keseimbangan yang tepat antara keinginan untuk memperoleh keuntungan dan menjamin lunasnya semua kredit yang disalurkan.

Akan tetapi berdasarkan contoh kasus yang di atas ternyata ada Bank tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit, hubungan dengan hal itu maka peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **“PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) KC SOLO KARTASURA”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan membawa pada pembahasan yang lebih terarah dari penelitian yang dilakukan yaitu :

1. Bagaimana prosedur perjanjian kredit di Bank Rakyat Indonesia (BRI) KC Solo Kartasura?
2. Bagaimana pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit di Bank Rakyat Indonesia (BRI) KC Solo Kartasura?

3. Faktor-faktor apa saja yang penghambat pelaksanaan prinsip kehati-hatian di Bank Rakyat Indonesia (BRI) KC Solo Kartasura?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan obyektif
 - a) Untuk mengetahui prosedur perjanjian kredit di Bank Rakyat Indonesia (BRI) KC Solo Kartasura.
 - b) Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit di Bank Rakyat Indonesia (BRI) KC Solo Kartasura .
 - c) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat penerapan prinsip kehati-hatian di Bank Rakyat Indonesia (BRI) KC Solo Kartasura.
2. Tujuan Subyektif
 - a) Untuk menambah dan memperoleh dan memperluas pengetahuan penulis dalam hal hukum perjanjian kredit, khususnya di Bank Rakyat Indonesia (BRI) KC Solo Kartasura.
 - b) Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan hukum sebagai syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1) Manfaat Teoritis

- a) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembang ilmu hukum di bidang hukum perdata, khususnya hukum perjanjian serta diharapkan dapat menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah.
- b) Memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit khususnya di Bank Rakyat Indonesia (BRI) KC Solo Kartasura.

2) Manfaat Praktis

- a) Bagi Bank Rakyat Indonesia (BRI) KC Solo Kartasura dan Nasabah dapat melakukan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit dengan baik sesuai dengan yang diperjanjikan dan mampu menghadapi kendala yang dihadapi.
- b) Untuk memberikan informasi pada masyarakat mengenai prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit.

E. Metode Penelitian

Metode dalam hal ini di artikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu pengetahuan yakni usaha di mana dilakukan dengan

menggunakan metode-metode tertentu.⁷ Suatu metode penelitian akan mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian.⁸ Dalam melakukan penelitian agar telaksana dengan maksimal maka penelitian mempergunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan ini mengkaji konsep normatif / yuridis perjanjian kredit yang ada dalam masyarakat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan empirisnya ditujukan terhadap praktik pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit di Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang ada dalam masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka penyusun teori baru.⁹

Berkaitan dengan jenis penelitian yang dimaksud di atas maka penelitian ini akan mendiskripsikan tentang prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit di Bank Rakyat Indonesia (BRI), hak-hak yang dilanggar dalam prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit di Bank Rakyat

⁷ Sutrisno Hadi. *Metodologi Riset*. Yogyakarta : UGM press. 1997.hal.3.

⁸ Noeng Muhadjir. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin. 1998.Hal. 3.

⁹ Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI. 1986.Hal. 13.

Indonesia (BRI) dilihat dari Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Bank Rakyat Indonesia (BRI) KC Solo Kartasura, yang terletak di Jalan Ahmad Yani No. 132 Sukoharjo. Juga alasan yang bersifat praktis, yaitu penelitian berdomisili di wilayah Surakarta sehingga dengan pemilihan lokasi tersebut dinilai lebih praktis dan efisien dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan oleh peneliti.

4. Jenis Data

Data adalah hasil dari penelitian baik berupa fakta-fakta atau angka yang dapat dijadikan bahan untuk dipakai suatu sumber informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan.

Data yang disajikan diperoleh dari sumber-sumber data yang meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasnya adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang dapat dari pihak Bank. Data Primer diperoleh peneliti dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) KC Solo Kartasura, baik dari bank dan pegawainya.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu.

Data Sekunder berupa bahan-bahan pustaka yang terdiri dari:

A. Bahan hukum primer meliputi:

- a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- b) Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.
- c) Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

B. Bahan hukum sekunder yang meliputi literatur-literatur yang terkait dengan perjanjian kredit, sehingga menunjang penelitian yang dilakukan.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dimaksud diatas digunakan teknik sebagai berikut:

a. Studi Keperpustakaan.

Dilakukan mencari, mencatat, menginventarisasikan dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka.

b. Wawancara

Yaitu proses tanya jawab secara langsung dua orang atau lebih berhadapan secara langsung atau tidak (melalui media komunikasi).

Sebagai data primer maka wawancara dilakukan terhadap pegawai Bank di bagian umum di Bank Rakyat Indonesia (BRI) KC Solo

Kartasura untuk mendapatkan data tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit di Bank Rakyat Indonesia (BRI) KC Solo Kartasura, faktor-faktor yang menghambat penerapan prinsip kehati-hatian di Bank Rakyat Indonesia (BRI) KC Solo Kartasura dan pelaksanaan perjanjian kredit dengan prinsip kehati-hatian kepada calon nasabah di Bank Rakyat Indonesia (BRI) KC Solo Kartasura.

6. Analisis Data

Tujuan analisis data dalam penelitian adalah untuk menyempitkan dan membatasi data dengan harapan menjadi data yang tersusun secara baik. Oleh karena itu, metode analisis yang sesuai dengan jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu analisis yang diperoleh baik dari observasi, wawancara, maupun studi keperpustakaan kemudian dituangkan dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis, dan selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan kejelasan yang diteliti.

Sesuai dengan pendapat Soejono Soekanto mengenai pengertian analisis data kualitatif, sebagai berikut:¹⁰

”Suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.”

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif. Langkah awal peneliti yaitu melakukan pengumpulan data baik

¹⁰ Soejono Soekanto .Oc.cit. Hal 15.

dilapangan maupun studi kepustakaan. Data yang diperoleh tersebut disusun dalam bentuk penyusunan data dan kemudian kemudian dilakukan pengolahan data dan seterusnya diambil kesimpulan, yang dilakukan saling menjalin dengan proses pengumpulan data. Apabila kesimpulan kurang akurat, maka peneliti melakukan verifikasi dan kembali mengumpulkan data di lapangan, tujuannya adalah untuk menjamin validitas yang ada.

E. Sistematika Skripsi

Penelitian skripsi ini terdiri atas empat Bab yang disusun secara sistematis, dimana antara bab saling berkaitan sehingga merupakan satu rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai :

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan penelitian
- D. Manfaat penelitian
- E. Metode penelitian
- F. Sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
 - 1. Pengertian Perjanjian

2. Jenis Perjanjian
3. Syarat Sahnya Perjanjian
4. Asas-asas Perjanjian

B. Tinjauan Umum Tentang Bank

1. Pengertian Bank
2. Dasar Hukum Perbankan
3. Jenis-jenis Bank
4. Dasar Hukum

C. Tinjauan Umum Tentang Kredit

1. Pengertian Kredit
2. Dasar Hukum Kredit
3. Pengertian Perjanjian Kredit

D. Tinjauan Prinsip Kehati-Hatian

1. Pengertian Prinsip Kehati-hatian
2. Macam-macam Prinsip Kehati-hatian

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana prosedur perjanjian kredit di Bank Rakyat Indonesia (BRI) KC Solo Kartasura?
2. Bagaimana pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit di Bank Rakyat Indonesia (BRI) KC Solo Kartasura?
3. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan prinsip kehati-hatian di Bank Rakyat Indonesia (BRI) KC Solo Kartasura?

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN